

BAB III
SIKAP ARAB SAUDI TERHADAP KUDETA DI TIMUR TENGAH
DAN KUDETA MESIR 2013

Arab Saudi selalu menunjukkan sikap terhadap setiap kudeta yang terjadi di Timur Tengah. Hal yang membedakan sikapnya terhadap kudeta satu dengan yang lainnya adalah tingkat keterlibatannya. Ada sikap SA yang terlibat langsung, namun ada juga yang sekedar menunjukkan keprihatinan dan pemberian bantuan bagi korban. Semua itu bergantung pada kepentingan nasional SA di Timur Tengah.

A. Gambaran Umum Kudeta di Timur Tengah dan Sikap Arab Saudi

Deretan peristiwa kudeta di Timur Tengah, seperti: 14 Januari 2012 di Tunisia yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali, 3 Juli 2013 di Mesir yang menggulingkan Muhammad Mursi, 14 Oktober 2016 di Libya yang menggulingkan Fayeze Al Sarraj, dan lain-lain, menjadi bukti bahwa kelompok kecil dapat merebut kekuasaan. Rezim mampu menciptakan militer yang handal untuk menyerang pihak terkudeta dan menciptakan ketakutan bagi sipil yang tidak terlibat. Dampaknya, militer resmi negara tidak cukup menjadi andalan, sebab militer dari sipil pun sanggup melatih dan memfasilitasi diri mereka untuk sebuah misi yang besar yakni kudeta.

Di sinilah keamanan negara mulai dipertanyakan, sebab ancaman melalui tindak politik dan/ kejahatan muncul dan membahayakan tatanan negara dan bangsa. Sejalan dengan itu penjelasan atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 4 menyebutkan bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa (Anwar, 2013). Meskipun pasukan keamanan negara telah menduduki posisinya masing-masing, namun kemungkinan ancaman tetap ada.

Di atas adalah ancaman dalam aspek militer, adapula ancaman non militer yang dianggap sebagai dampak negatif dari globalisasi, yang mana globalisasi menghilangkan batas pergaulan antar negara. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Khususnya di Timur Tengah, paham demokrasi dan kebangkitan Islam begitu cepat terserbar sehingga revolusi banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, dan mengancam eksistensi sistem pemerintahan monarki otoriter.

Adapun ancaman dalam bidang politik dapat berupa penggunaan kekuatan melalui pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Dalam bidang ekonomi, penghapusan terhadap arus modal, barang dan jasa dapat mengancam kedaulatan ekonomi suatu negara. Dan ancaman dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua,

yakni ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam seperti: kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan yang menimbulkan permasalahan terorisme, kekerasan, separatisme, dan lain-lain. Ancaman dari luar timbul sebagai dampak negatif globalisasi.

Kembali pada pembahasan kudeta di Timur Tengah, pemicu kudeta sejalan dengan bentuk-bentuk ancaman di atas. Misalnya kudeta di Mesir, pemicunya adalah ancaman politik dimana terdapat kekuatan militer yang dipimpin Jenderal Al Sissi yang berusaha menggulingkan kekuasaan pemerintahan Muhammad Mursi. Selanjutnya, kami lampirkan daftar kudeta di Timur Tengah :

Tabel 3.1 Daftar kudeta di Timur Tengah

No.	Negara	Waktu	Pihak Terkudeta	Ket.
1	Mesir	3 Juli 2013	Muhammad Mursi	Berhasil
2	Turki	15 Juli 2016	Recep Tayyip Erdogan	Gagal
3	Yaman	21 September 2014	Mansour Hadi	Berhasil
4	Libya	14 Oktober 2016	Fayez Al Sarraj	Gagal
5	Tunisia	14 Januari 2014	Zine El Abidine Ben Ali	Berhasil
6	Suriah	2016	Ahmad Al Audah	Gagal

1. Kudeta di Mesir

Demonstrasi anti Mursi tersebut mulai berlangsung pada tanggal 28 Juni di beberapa titik vital Mesir seperti Kairo, Alexandria, Dakahlia, Gharbiya dan Aswan. Dan pada tanggal

30 Juni, sekitar 14 miliar demonstran memenuhi area demonstrasi untuk memprotes Mursi dan IM yang dituduh membajak revolusi Mesir dan memonopoli kekuasaan untuk misi pemberlakuan hukum Islam di Mesir. Menyusul tanggal 1 Juli, lebih dari 1 juta demonstran terhadap Mursi berkumpul di Tahrir Square dan di luar istana Presiden, sementara demonstrasi lainnya diadakan di kota-kota Alexandria, Port Said dan Suez. Berlanjut pada tanggal 2 Juli, pihak pro dan anti Mursi berkumpul di Kairo sebagai batas waktu yang ditetapkan militer bagi pemerintahan Mursi untuk meninggalkan kekuasaan.

Pada tanggal 3 Juli 2013, Panglima Militer Mesir Jenderal Abdel Fattah Al Sissi memimpin koalisi untuk menghapus kekuasaan Presiden Muhammad Mursi. Tindakan tersebut muncul dipicu oleh demonstrasi pro dan anti Mursi di atas yang meluas secara nasional dengan membawa dua bendera ideologi yang berbeda. Puncaknya adalah militer menangkap Mursi dan pemimpin IM satu hari sebelum kudeta sampai tanggal 5 Juli 2013, serta menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Agung Mesir Adly Mansour sebagai Presiden sementara Mesir.

2. Kudeta di Turki

Pada tanggal 15 Juli 2016, sebuah kudeta yang ditujukan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Upaya tersebut dilancarkan oleh faksi dalam angkatan bersenjata Turki yang mengorganisir diri sebagai Dewan Perdamaian. Mereka berusaha untuk menguasai beberapa tempat penting di Ankara, Istanbul, dan di tempat lain, tetapi gagal untuk melakukannya setelah pasukan bela negara mengalahkan mereka.

Kudeta diduga dipimpin oleh pemimpin gerakan teroris Turki, Fethullah Gulen. Alasan kudeta karena pemerintahan Erdogan diduga sekuler, menghapuskan pemerintahan demokratis, mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia dan menghilangkan kredibilitas Turki di dunia internasional. Kudeta ini menewaskan lebih dari 300 orang dan lebih dari 2.100 orang luka-luka. Banyak gedung-gedung pemerintah, termasuk DPR Turki dan istana Presiden rusak.

3. Kudeta di Yaman

Pejuang Houthi memberikan pernyataan pada pemerintah dan warga Yaman tentang misi kudetanya, yakni kudeta untuk membubarkan parlemen dan membentuk pemerintahan sendiri. Pernyataan tersebut mengundang ribuan orang untuk berkumpul di Yaman mengecam pernyataan

tersebut. Houthi pun mengumumkan akan membentuk Komisi Keamanan untuk memerintah Yaman selama dua tahun ke depan. Demonstrasi kemudian meletus di ibukota Sanaa, serta kota-kota; Aden, Hodeida, Taiz, Dhamar, Ibb dan Al Bayda.

Setelah empat hari bentrok senjata dan proses negosiasi antara pihak pemberontak dan pasukan keamanan Yaman, Presiden Mansour Hadi menyerah pada tuntutan pemberontak untuk melakukan gencatan senjata. Presiden Mansour Hadi mengundurkan dirinya sebagai Presiden Yaman, disusul dengan penandatanganan perjanjian damai dan Perjanjian Kemitraan Nasional (PNPA) tanggal 21 September 2015 oleh pemerintah, partai politik, dan gerakan pemberontak Houthi.

4. Kudeta di Libya

Kudeta di Libya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2016 yang dilakukan oleh mantan Kepala Pemerintah Nasional Keselamatan Khalifa Haftar Al Ghawil terhadap Perdana Menteri Fayez Al Sarraj. Kudeta tersebut berlangsung di ibukota Tripoli. Pihak terkudeta mendapat dukungan dari PBB, Amerika, Inggris dan Uni Eropa. Dukungan tersebut berupa pengakuan bahwa pemerintah terkudeta merupakan pemerintah sah Libya.

Kudeta dipicu oleh rasa tidak menerima Haftar terhadap tindakan pemerintah yang menggulingkannya. Haftar merupakan Perdana Menteri yang sebelumnya dijatuhkan oleh kubu pemerintah terkudeta. Namun, kudeta berakhir dengan kegagalan. Kekalahan Haftar dan pasukannya menyebabkan sejumlah kabilah dan suku yang semula setia pada Haftar, seperti suku Al ‘Awaqir, berbalik menyerang Haftar dan pasukannya. Serta menuduh Haftar dan pasukannya telah menyebabkan tewasnya pemuda pemuda sukunya. Tidak hanya itu, Al ‘Awaqir juga mengusir Haftar dan pasukannya dari wilayah mereka. Akibatnya, kekalahan yang terus menerus menimpa Haftar mengakibatkan perpecahan di tubuh Haftar sendiri.

5. Kudeta di Tunisia

Kudeta atas Presiden Zine El Abidine Ben Ali ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2014. Berbeda dengan kudeta Mesir, kudeta di Tunisia terjadi bukan karena tentara/militer negara yang campur tangan pada urusan politik pemerintah. Melainkan karena terdapat perbedaan ideologis antara “dua Tunisia,” yakni kalangan Islam yang memimpin pemerintah koalisi negara dan kalangan sekuler. Dengan kata lain, Tunisia tidak mengalami konflik seperti di Mesir. Kudeta Tunisia yang oleh kalangan

tertentu disebut revolusi Tunisia dilancarkan oleh pemuda yang frustrasi terhadap pemerintahan.

6. Kudeta di Suriah

Kudeta di Suriah yang terjadi tahun 2016 ini dilancarkan oleh anggota kelompok teroris yang menyebut dirinya sebagai pemuda di kota Basri Al Sham di provinsi Dara'a, Selatan Suriah, tetapi mereka gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan terbelah menjadi dua kelompok, yakni pendukung Ahmad Al Audah komandan yang merupakan subjek dari kudeta, dan Muhammad Tomah, pimpinan komplotan kudeta (News, Kecewa Kalah Terus, Teroris Suriah Lancarkan Kudeta Internal, 2016). Komplotan kudeta menuduh Al Audah melakukan korupsi dan berhubungan dengan ISIS serta menyeru agar ia diturunkan dari kekuasaan. Pasukan pro-kudeta juga menuntut operasi intensif untuk mengalihkan perhatian tentara Suriah dari Utara ke Selatan Suriah, tetapi gagal melaksanakan kudeta tersebut.

Terkait kudeta di negara-negara Timur Tengah, SA menunjukkan sikap dan respon yang berbeda-beda kepada satu negara dengan negara lainnya. Hal itu dipengaruhi oleh kepentingan

nasional yang dibawanya. Dalam kudeta Turki, SA menyambut kesuksesan Presiden Erdogan dalam menggagalkan kudeta militer (Muhaimin, 2016). Namun menurut sumber lain yang dilansir dari situs Iqna, terkait para pelaku di balik layar kudeta ini ia mengungkapkan, Binali Yildirim, Perdana Menteri baru-baru ini mengambil sikap positif dalam mendukung Suriah, sementara tidak menyenangkan untuk Amerika dan sistem monarki Arab Saudi dan kemungkinan sikap ini berpengaruh dalam terjadinya kudeta (Iqha, 2016)

Bukti lain yang menunjukkan bahwa SA terlibat dalam kudeta Turki adalah Muhammad bin Salman pejabat senior pemerintahan di Riyadh telah diberitahu akan adanya kudeta di Turki jauh sebelum berlangsungnya kudeta. Alasannya, Muhammad bin Salman memiliki kedekatan dengan pihak yang mengkudeta di Turki. Di saat pelaksanaan sidang tertutup parlemen, pemimpin sidang Mr.Zarif mengatakan bahwa pada prinsipnya, kami mengutuk setiap aksi kudeta di bagian manapun di dunia dan percaya bahwa rakyat harus memainkan peran dalam demokrasi (News, Mujtahid: Arab Saudi, UEA Terlibat Kudeta di Turki, 2016). Dan beberapa negara yang salah satunya SA enggan untuk berkomentar pada pernyataan pemimpin sidang tersebut. Enggan pula memberikan pendapat terkait penyelesaian masalah kudeta.

Pada bulan Maret 2015, bentuk intervensi SA dalam kudeta Yaman adalah memimpin serangan udara dan blokade laut. Tindakan tersebut disebut dengan operasi militer “badai penghancur” (*aashifatul hazm*) terhadap pemberontak Al Houthi Yaman. Hal ini dilakukan sesuai permintaan Presiden terkudeta Yaman, Abdrabuh Mansur Hadi yang meminta bantuan negara-negara Arab pasca kudeta. Awalnya, intervensi hanya berupa kampanye pemboman. Namun kemudian berlanjut pada tindakan blokade laut dan penyebaran pasukan darat ke Yaman. Koalisi SA menyerang posisi milisi Al Houthi dan pengikut setia mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh.

SA juga memimpin aksi militer negara-negara Timur Tengah yang lain; Mesir, Maroko, Yordania, Sudan, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar dan Bahrain mengirimkan jet tempur dan pasukan daratnya. Djibouti, Eritrea dan Somalia membuat wilayah udara mereka, serta menyediakan perairan teritorial dan pangkalan militer untuk koalisi SA. SA juga memanggil Pakistan untuk bergabung dalam koalisi, namun mereka lebih memilih untuk menjaga netralitas. Dan pada 21 April 2015, koalisi SA mengumumkan untuk mengakhiri operasi militer badai penghancur, dan memilih untuk beralih pada intervensi politik. Kerajaan dan mitra koalisi melancarkan upaya politik dan perdamaian yang mereka sebut dengan “operasi memulihkan harapan Arab” (*‘amaliyyat i’adat al*

amal). Namun jika sesekali kekuatan militer diperlukan, koalisi pun tetap akan tanggap terhadap ancaman tersebut.

Respon SA terhadap kudeta di Tunisia tidak se-agresif responnya terhadap kudeta di Mesir. Raja Abdullah memilih untuk melihat Tunisia bukan sebagai aktor Islam yang berpengaruh meskipun SA memberikan suaka politik pasca Ben Ali jatuh dari tampuk kepemimpinannya akibat kudeta. Namun informasi lain yang bertentangan muncul ketika terdapat pernyataan bahwa alasan SA tidak memberikan perhatian lebih terhadap kudeta Tunisia adalah karena perubahan rezim Ben Ali menjadi sekutu dalam memberantas terorisme, dalam mengamankan stabilitas keamanan di Afrika Utara dan dalam melawan pengaruh Iran di kawasan itu. Hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri bagi SA, menduga Tunisia dapat mengganggu hegemoninya di Afrika Utara.

Terhadap kudeta di Suriah, SA menunjukkan keprihatinan dan kesedihan mendalam atas kedzaliman yang terjadi di Suriah. Dan menjadi perhatian penting kerajaan dalam KTT Liga Arab. Serangan bombardir dari udara dan gas beracun begitu menyiksa rakyat Suriah. Solusi yang diajukan SA adalah keteguhan untuk berpegang pada keputusan pertama Konferensi Jenewa serta mengajak saudara seiman dari negara lain untuk sama-sama membantu kebangkitan Suriah

B. Gambaran Umum Kudeta Mesir 2013 dan Sikap Arab Saudi

Berbeda dengan kudeta di negara-negara Timur Tengah sebelumnya, sikap SA terhadap kudeta di Mesir lebih terkesan agresif. Alasannya, jika misalnya di Tunisia, SA hanya sebagai pemberi suaka, di Yaman sebagai pemimpin operasi militer atas permintaan Presiden terkudeta, dan lain-lain, namun di Mesir SA sebagai pendukung utama pemimpin kudeta, Jenderal Al Sisi.

Fakta di atas sebagai efek *Arab Spring* terhadap SA, dimana banyak munculnya negara Islam yang beralih ideologi menjadi penganut demokrasi. Era saat ini sistem pemerintahan monarki absolut sudah tidak relevan, rakyat membutuhkan ruang untuk menikmati kebebasannya dalam berpolitik. Sehingga, sikap pemimpin yang otoriter dan paham bahwa titah Raja adalah titah Tuhan yang tak bisa dibantah menjadi momok bagi pendamba demokrasi.

Begitupula dengan Mesir, setelah tumbang rezim otoriter Husni Mubarak, kini Mesir berpindah tangan pada pemimpin demokratis Muhammad Mursi yang berasal dari organisasi Ikhwanul Muslimin. Perpindahan ideologi itu dibawa oleh organisasi tersebut dan pahamnya berhasil menyebar pula di negara-negara lain sebagai bentuk kebangkitan Islam. Prestasi seperti ini tidak bisa lepas dari perhatian SA yang menjadi 'center'

negara-negara Arab. Monarkinya mulai terancam dan kiblat negara-negara Timur Tengah berpindah dari dirinya.

Berangkat dari motif di atas, SA tidak bisa membiarkan eksistensi organisasi IM yang di Mesir diwakili oleh Presiden terpilih Mursi. SA bersama Al Sisi dan pasukannya melancarkan kudeta atas Mursi hingga mencapai keberhasilan. Mursi jatuh dari tampuk kepemimpinannya dan digantikan oleh Presiden sementara Adly Mansur yang ternyata memiliki kecondongan terhadap yahudi. Ia adalah pengikut sekte sabatiyyah, yaitu sekte yahudi. Dia berusaha untuk mendekati nasrani, namun Paus Kopti menolak untuk membaptisnya (Mansur, 2013).

Adapun bentuk dukungan SA dalam kudeta semakin menunjukkan bahwa SA bersekutu dengan militer Mesir. Enam hari setelah penggulingan Mursi, SA kembali menunjukkan dukungan aktifnya terhadap kudeta. SA mengumumkan bahwa ia menyumbangkan dana US\$ 5 miliar untuk Mesir. Arab Saudi juga tidak peduli terhadap pembunuhan pendukung Ikhwanul Muslimin oleh militer Mesir. Bantuan tersebut, yang diputuskan oleh Raja Abdullah pada 9 Juli 2013, akan terdiri atas US\$ 2 miliar deposito bebas bunga di bank sentral Mesir, US\$ 1 miliar donasi, dan setara dengan US\$ 2 miliar berupa produk-produk minyak dan gas. Bantuan US\$ 5 miliar yang disalurkan SA mencerminkan dukungan

kerajaan terhadap situasi dan perubahan terbaru di Kairo (M.Saeri, 2014).

Bukan itu saja, SA menjanjikan akan memberikan bantuan keuangan non stop jika negara-negara Barat menghentikan bantuannya kepada Mesir. Dukungan ekonomi SA sangat dibutuhkan bagi keberhasilan pemerintahan transisi Adly Mansur, sebagaimana Mesir telah berjuang untuk memulihkan ekonomi dari resesi yang melanda setelah revolusi 2011. Sehingga bantuan tersebut memiliki dampak besar dalam menentukan keputusan Mesir untuk terhindar dari situasi perekonomian terburuk. Dan bagi SA, mendukung pemerintah sementara Mesir adalah sebuah investasi dalam hubungan dengan rezim baru di Mesir.

Selanjutnya, keputusan luar negeri SA yang mendukung kudeta menjadi poin yang problematis. Di saat banyak pihak yang mengecam, SA justru mendukung. Aktor hubungan internasional baik individu maupun kelompok perlu untuk merespon suatu permasalahan global. Tindakan seperti itu dilakukan untuk menunjukkan arah politik yang dibawanya. Sehingga respon terhadap permasalahan menentukan identitas politik aktor. Begitu halnya dengan bentuk-bentuk respon negara atau organisasi tertentu terhadap kudeta Mesir. Ada negara atau organisasi yang mendukung, adapula yang mengecam. Tindakan baik mendukung atau mengecam menentukan arah politiknya.

Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri, Catherine Ashton mengecam kudeta Mesir. Dan meminta pihak yang terkait untuk kembali melakukan proses demokrasi yang mana dapat diselenggarakannya pemilihan Presiden dan parlemen yang bebas dan adil dengan persetujuan konstitusi, dilaksanakan dengan cara yang terbuka, sehingga mengizinkan negara untuk melanjutkan dan menyelesaikan transisi demokrasi. Sikap yang sama dilakukan oleh Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya tidak dapat menerima tindakan yang melecehkan demokrasi, dan Turki menyerukan pembebasan tahanan terhadap Mursi dan aktivis IM.

Ennahda Rachid Ghannouchi, pemimpin partai mewakili para islamis di Tunisia menyatakan keheranannya terhadap kudeta. Ia begitu tidak sepakat terhadap penggulingan pimpinan yang dipilih secara demokratis, hal itu akan menghasilkan akan menumbuh-suburkan radikalisme. Adapun Inggris, Inggris tidak mendukung intervensi militer sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem demokrasi. Inggris menyerukan semua pihak untuk terus berpikir ke depan demi terselenggaranya transisi politik Mesir yang baik, dengan cara menanggapi suara rakyat Mesir.

Begitupun dengan Amerika Serikat yang digadang-gadang ada di balik kudeta, ternyata menyatakan keprihatinannya. Dan menyerukan agar Mesir dapat mengembalikan pemerintahan sipil,

meskipun harus melalui proses yang sulit. Namun dengan mendengarkan suara rakyat dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang jujur, maka mimpi demokrasi dapat tercapai. Bagi Jerman, intervensi militer adalah kemunduran besar bagi demokrasi Mesir. Agar efek kudeta tidak lebih meluas, Jerman menyarankan Mesir untuk melakukan dialog dan kompromi politik. Selanjutnya Prancis, Prancis berharap demokrasi di Mesir menghormati perdamaian sipil, pluralisme, kebebasan individu dan transisi demokrasi, sehingga rakyat Mesir bebas memilih pemimpin mereka dan masa depannya. Indonesia pun begitu mengecam kudeta yang meruntuhkan demokrasi Mesir. Dan Indonesia mengajak negara-negara penganut demokrasi untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi Mesir, yakni dengan upaya melantik kembali Mursi secara simbolik namun tidak diberi wewenang atas jalannya pemerintahan.